



FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA

FPHJ

Jl. Pasir Impun Atas Sekebalimbing No. E 5 A Cimeunyan Bandung Jawa Barat
Telp. 0878-2176-9028, E-mail : forumpenyelamathutanjawa@gmail.com

Bandung, 14 September 2026

Nomor : 004/EXT/RK-FPHJ/IX/2026
Perihal : Undangan Rapat Kerja
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada, Yth.

Daftar Undangan Terlampir

Di Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berbagai situasi kondisi hutan yang dirasakan semakin hari semakin menurun di Jawa Barat, akibat dari berbagai hal, yang sudah dirasakan akan mengancam terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan saat ini maupun dimasa depan, bersama ini disampaikan bahwa Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) akan menyelenggarakan rapat kerja bersama multi pihak:

Hari/tanggal : Kamis, 17 September 2026
Waktu : 08.30 – 15.15 WIB
Tempat : Aula Julang Ngapak Alam Santosa (ESA Coffe Culture) Kampung Sekebalimbing
No.5 A Desa Cikadut, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat
Agenda : 1. Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum di Kawasan Hutan
2. Penandatanganan pakta integritas bersama

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dimaksud serta memberikan pandangan, masukan, dan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

Ketua Panitia,

Dr. Hj. Neneng Neni, M.P.

Sekretaris,

Rizal Parghani, S.T., M.M.

Mengetahui,

Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ)



Drs. H. Eka Santosa

DAFTAR UNDANGAN :

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, sebagai keynote speaker
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan
3. Komisi IV DPR RI (perwakilan)
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat, sebagai pembuka dan memberikan pengarahan
5. Pimpinan DPRD Jawa Barat
6. Kepolisian Daerah Jawa Barat
7. Kodam III Siliwangi
8. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat
9. Badan Intelijen Nasional Daerah Jawa Barat
10. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
11. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
12. Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat
13. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
14. Perum Perhutani
15. PT. Perkebunan Nusantara
16. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
17. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
18. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
19. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy
20. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung
21. Balai Perhutanan Sosial Bogor
22. Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta
23. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Ciamis
24. Penyuluh Kehutanan
25. Forum DAS
26. Masyarakat Konservasi
27. Masyarakat Adat (Baresan Olot) Jawa Barat
28. Kaukus Ketokohan Jawa Barat
29. Komunitas Ketahanan Pangan Jawa Barat
30. RPLH
31. LMDH Jawa Barat
32. Pemuda Pancasila Jawa Barat
33. Corong Jawa Barat

TERM OF REFERENCE (TOR)
RAPAT KERJA FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA (FPHJ)
“PENEGAKAN HUKUM UNTUK KESELAMATAN DAN KELESTARIAN KAWASAN HUTAN”

I. LATAR BELAKANG / DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan ajakan Presiden RI yang disampaikan dalam Sidang Umum MPR tentang ajakan untuk berswasembada di bidang pangan, energi, dan air sesuai Asta Cita, hal tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah lingkungan dan terutama keberadaan serta keberlangsungan kawasan hutan. Hutan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber air, ketahanan pangan, energi, pengendalian perubahan iklim, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, menjaga keselamatan dan kelestarian kawasan hutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Namun demikian, kondisi kawasan hutan dari waktu ke waktu menghadapi tekanan yang semakin besar akibat berbagai aktivitas, antara lain illegal logging, perambahan, perburuan liar, alih fungsi kawasan, serta berbagai bentuk pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika terdapat regulasi dan kebijakan yang dalam implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap kawasan hutan, bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan status dan fungsi kawasan, serta membuka ruang bagi kepentingan pemanfaatan yang dapat mengurangi fungsi lindung hutan.

Berbagai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya pada dasarnya telah diarahkan untuk menjaga dan mengelola kawasan hutan. Namun, apabila regulasi tidak sinkron, pengawasan lemah, dan terdapat celah dalam penerapannya, maka kebijakan perlindungan hutan dapat kehilangan efektivitasnya. Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru harus dipastikan tidak menjadi celah yang melemahkan upaya pelestarian hutan.

Dalam kondisi tersebut, penegakan hukum menjadi sangat penting. Penegakan hukum tidak hanya diperlukan terhadap pelaku kerusakan hutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pemanfaatan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengorbankan fungsi ekologis dan fungsi lindung hutan. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, profesional, transparan, dan berkeadilan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang.

Pelestarian hutan juga tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat, akademisi, pemerhati dan aktivis lingkungan serta kehutanan, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan dan memastikan setiap kebijakan pengelolaan kawasan tetap berpihak pada keselamatan dan kelestarian hutan.

Atas dasar tersebut, Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) memandang perlu menyelenggarakan rapat kerja bersama sebagai ruang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan regulasi dan implementasinya, memetakan kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, aparat penegak hukum, akademisi, pemerhati dan aktivis lingkungan serta kehutanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi mengenai eksistensi, peran, fungsi, tugas, kewenangan, serta kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Ditjen Gakkum Kemenhut).

II. TEMA KEGIATAN

“PENEGAKAN HUKUM UNTUK KESELAMATAN DAN KELESTARIAN KAWASAN HUTAN”

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

1. Menyamakan persepsi antara instansi pemangku pengelolaan kawasan hutan dengan masyarakat dan pemerhati serta aktivis lingkungan dan kehutanan
2. Memetakan kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung dari setiap pemangku kawasan hutan
3. Meningkatkan pemahaman mengenai eksistensi, peran, fungsi, tugas, kewenangan, dan kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Ditjen Gakkum Kemenhut)

B. Tujuan

Terjaga dan terpeliharanya kawasan hutan terutama yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan Renstra Prov Jabar yang menetapkan 40% target kawasan lindung.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/tanggal : Kamis, 17 September 2026

Waktu : 8.30 WIB – selesai

Tempat : Aula Julang Ngapak, Alam Santosa Ekowisata dan Budaya (Esa Coffee & Culture)
Kp. Sekebalimbing Ds. Cikadut, Kec. Cimenyan Kabupaten Bandung- Jawa Barat

V. AGENDA KEGIATAN

1. Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum di Kawasan Hutan
2. Penandatanganan pakta integritas Bersama

VI. PESERTA DAN UNDANGAN

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, sebagai keynote speaker
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan
3. Komisi IV DPR RI (perwakilan)
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat, sebagai pembuka dan memberikan pengarahan
5. Pimpinan DPRD Jawa Barat
6. Kepolisian Daerah Jawa Barat
7. Kodam III Siliwangi
8. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat
9. Badan Intelijen Nasional Daerah Jawa Barat
10. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
11. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
12. Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat
13. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
14. Perum Perhutani
15. PT. Perkebunan Nusantara
16. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
17. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
18. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
19. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy
20. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung
21. Balai Perhutanan Sosial Bogor
22. Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta
23. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Ciamis
24. Penyuluh Kehutanan
25. Forum DAS
26. Masyarakat Konservasi
27. Masyarakat Adat (Baresan Olot) Jawa Barat
28. Kaukus Ketokohan Jawa Barat

29. Komunitas Ketahanan Pangan Jawa Barat
30. RPLH
31. LMDH Jawa Barat
32. Pemuda Pancasila Jawa Barat
33. Corong Jawa Barat

VII. RUNDOWN KEGIATAN

No	Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
1	08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
2	09.00 – 10.00	Pembukaan dan doa	Panitia
		Menyanyikan Indonesia Raya	Panitia
		Menyanyikan Mars Rimbawan	Panitia
		Sambutan Prakata Penyelenggara	FPHJ
		Arahan dan pembuka acara	Gubernur Jawa Barat
3	10.00 – 10.15	Paparan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (keynote speaker)	Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan
4	10.15 – 10.30	Paparan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
5	10.30 – 10.45	Peta Kondisi dan Gangguan Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Barat	Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
6	10.45 – 11.15	Peta Kondisi dan Gangguan Kawasan Hutan di lingkup UPT Kementerian Kehutanan di Jawa Barat	Kepala BBKSDA Jawa Barat / Korwil UPT Kemenhut Jabar
7	11.15 – 11.30	Peta Kondisi dan Gangguan Kawasan Hutan di wilayah kerja Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Perum Perhutani	Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Perum Perhutani
8	11.30 – 11.45	Peta Kondisi dan Gangguan Kawasan Hutan di wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara Jawa Barat	Kepala PT Perkebunan Nusantara Jawa Barat
9	11.45 – 13.00	Ishoma	Panitia
10	13.00 – 13.30	Diskusi dan tanya jawab	Panitia
		Tanggapan Polda Jabar	Panitia
		Tanggapan Kejati Jabar	Panitia
11	13.30 – 15.00	Forum Diskusi dan Perumusan Rekomendasi	Panitia
12	15.00 – 15.15	Penandatanganan Pakta Integritas dan foto bersama	Panitia

VIII. HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui pelaksanaan rapat kerja ini diharapkan:

1. Terbangun kesamaan persepsi antar-pemangku kepentingan mengenai kondisi, ancaman, dan persoalan kawasan hutan di Jawa Barat.
2. Tersusunnya gambaran dan pemetaan awal mengenai kondisi serta berbagai gangguan terhadap kawasan hutan, khususnya kawasan yang memiliki fungsi lindung.
3. Teridentifikasinya persoalan regulasi, kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.
4. Meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap peran, fungsi, tugas, kewenangan, dan kinerja Ditjen Gakkum Kemenhut.

5. Terbangunnya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kejahatan di bidang kehutanan.
6. Tersusunnya rekomendasi hasil rapat kerja sebagai bahan tindak lanjut para pemangku kepentingan.
7. Terbangunnya komitmen bersama melalui penandatanganan Pakta Integritas untuk mendukung pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum di kawasan hutan.
8. Meningkatkan komitmen bersama untuk menjaga keselamatan, fungsi ekologis, dan kelestarian kawasan hutan, khususnya kawasan yang memiliki fungsi lindung.

VII. SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab : Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ)
Ketua Panitia : Dr. Hj. Neneng Neni, M.P.
Sekretaris : Rizal Parghani, S.T., M.M
Bendahara : Ira Zega, S.T.

SEKSI-SEKSI

Seksi Acara & Persidangan : Iman Sandjodjo
Tyo Setiowekti
Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Undangan : Poppy
Seksi Akomodasi, Perlengkapan & Tempat : Sahat
Iskandar
Seksi Dokumentasi dan Publikasi : Rd. Mokhammad Gungun